

BAB IV

SIMPULAN

Melihat tindakan yang diambil pemerintah dengan menghilangkan panggilan “Cina” dan menggantinya dengan kata “Tionghoa” ataupun “Tionggok” ke depannya memang merupakan suatu keputusan yang bagus. Akan tetapi apabila keputusan yang dibuat itu tidak tersebar secara merata dan tidak ditanggapi oleh masyarakat Indonesia, maka itu hanya akan menjadi sia sia belaka. Sebab sampai sekarang ini pada kenyataannya tetap saja panggilan “Cina” masih banyak digunakan, baik di media massa maupun kehidupan sehari-hari. Padahal dengan adanya keputusan itu bisa saja mendorong terjadinya proses asimilasi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat etnis non Tionghoa di Indonesia dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Pada hakikatnya, memang panggilan “Cina” tidak mengandung makna negatif sama sekali. Seperti yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah sebuah negeri di Asia / Tionggok dan bangsa yang tinggal di Tionggok / Tionghoa. Beberapa narasumber yang ditanya mengenai hal ini juga mengatakan demikian, bahwa sebenarnya panggilan “Cina” tidak mengandung makna negatif sama sekali, hanya saja panggilan itu menjadi tidak enak didengar di saat panggilan itu diucapkan dalam konteks dan waktu yang memang benar-benar menghina. Contohnya adalah seperti kalimat-kalimat berikut ini:

- "Dasar Cina lu."
- "Eh Cina lu! Cina lu!"
- "Woi Cina ngapain disini?"

Kalimat-kalimat di atas dirasa kurang tepat, karena di dalamnya terdapat kata “Cina” yang terkesan memojokkan suatu etnis “Tionghoa”. Hal ini juga bisa terjadi pada etnis lain, tidak hanya pada etnis “Tionghoa” saja. Akan tetapi, hal yang menjadikannya berbeda adalah latar belakang kemunculan kata “Cina” itu sendiri. Penggunaannya yang berdasarkan sejarah memiliki ketimpangan untuk menjelekkkan etnis “Tionghoa” pada saat itulah yang membuat penggunaan kata “Cina” hingga sekarang ini masih tetap dirasa memiliki unsur diskriminasi rasial.

Tanggapan oleh sebagian besar etnis “Tionghoa” terhadap masalah panggilan ini masih jelek. Mereka sampai saat ini masih menganggap bahwa penggunaan panggilan “Cina” masih dirasa menghina mereka. Terdapat sebanyak 90% orang-orang beretnis “Tionghoa” tidak menyukai panggilan ini. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, apabila dibagi berdasarkan jenjang umur, maka akan didapatkan kesimpulan seperti di bawah ini:

SUBYEK PENELITIAN	SUKA	TIDAK SUKA
ANAK MUDA	0%	100%
DEWASA	9%	91%
ORANG TUA	0%	100%
TOTAL	3%	97%

Peneliti mendapat kesimpulan bahwa ketidaksukaan terhadap panggilan “Cina” tidak hanya yang berumur tua saja, namun sebagian besar yang berusia muda juga berpendapat demikian. Bagi yang berumur tua berpendapat demikian disebabkan karena pada masanya penggunaan panggilan “Cina” benar-benar merupakan panggilan yang sangat menghina. Mereka ingin dipanggil “Tionghoa” ketimbang panggilan “Cina”. Bahkan ada yang ingin agar dihapus panggilan itu agar diskriminasi rasial di negara Indonesia benar-benar hilang.

Berbeda dengan yang memiliki jenjang umur remaja dan dewasa. Sebagian besar dari mereka memang menganggap panggilan “Cina” adalah panggilan yang menghina. Akan tetapi, sebagian kecil dari mereka menganggap bahwa panggilan “Cina” sah-sah saja digunakan. Bagi mereka dirinya memang adalah orang keturunan “Cina”, apabila orang lain ingin memanggil diri mereka adalah orang “Cina”, hal ini adalah benar. Tidak ada yang harus disalahkan. Mereka juga mengatakan bahwa penolakan penggunaan panggilan “Cina” sama saja dengan penolakan jati diri sendiri.

Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang masih muda, ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwa panggilan “Cina” mengandung arti negatif namun sebenarnya mereka mengetahui bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada arti negatif sama sekali. Hal ini dikarenakan mereka mendapat ajaran dari orang tua mereka bahwa panggilan “Cina” tidak baik. Selain dari faktor tersebut, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Faktor lingkungan yang sering menjadikan panggilan “Cina” sebagai ejekan, lambat laun tersimpan di memori mereka bahwa panggilan “Cina” tidak baik sama sekali.

Berbeda halnya dari pihak orang tua yang menganggap panggilan “Cina” mengandung arti negatif. Mereka beranggapan demikian karena mereka melewati masa-masa di mana penggunaan panggilan “Cina” memang digunakan untuk mengejek masyarakat etnis Tionghoa. Masa-masa itu yaitu pada saat seminar angkatan darat. Pengalaman pada masa-masa itulah yang membuat mereka menjadi tidak suka dengan panggilan “Cina”.

Untuk menghindari adanya bentrok dan berbagai macam bentrokan antar etnis kedepannya yang mungkin saja bisa terjadi, maka peneliti ingin memberikan beberapa solusi baik bagi masyarakat yang beretnis “Tionghoa” maupun bagi masyarakat yang beretnis “non Tionghoa”.

Bagi masyarakat beretnis non Tionghoa sebaiknya lebih memperhatikan penggunaan panggilan “Cina” itu sendiri secara lebih hati-hati. Pembicara harus memperhatikan penekanan pembicaraannya, karena hal itulah yang menyebabkan suatu kalimat apakah menjadi suatu hinaan atau tidak.

Masyarakat beretnis non Tionghoa sebaiknya lebih bersifat terbuka terhadap penggunaan panggilan “Cina” dan mulai membiasakan diri menggunakannya. Memang walaupun Presiden sudah secara resmi mengubah panggilan itu, namun tetap saja hal itu susah untuk diubah. Dengan kata lain, kedepannya pasti tetap akan terdengar panggilan “Cina”. Mengingat bahwa panggilan itu sudah sangat lama digunakan, khususnya di Indonesia sudah seabad lebih lamanya. Akan tetapi, tidak ada hasil yang bisa dicapai apabila tidak ada niat untuk mencapai hasil tersebut.

Salah satu sumber yang didapatkan peneliti bahwa akar masalah timbulnya diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa sampai saat ini adalah dikarenakan

sikap superior masyarakat etnis Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda terhadap kaum pribumi juga harus dihilangkan jauh-jauh dari pikiran kita. (Charles A. Coppel, 1994: 36). Hal tersebut adalah masa lalu negara kita. Sudah seharusnya di dalam negara kita, baik masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis non Tionghoa masing-masing berpikiran terbuka yaitu dengan menghilangkan jauh-jauh pikiran superior bagi masyarakat etnis Tionghoa dan penerimaan dari masyarakat non etnis Tionghoa sendiri.

Hal lain yang harus diperhatikan baik oleh masyarakat beretnis Tionghoa maupun yang beretnis non Tionghoa adalah mereka masing-masing harus benar-benar mempunyai rasa kesatuan, rasa memiliki negara Indonesia ini. Apabila kita semuanya mempunyai pemikiran seperti itu, tentunya kita masing-masing akan mencoba sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan persatuan yang ada. Sebab bagaimanapun juga, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari 1.128 etnis bangsa di dalamnya. Artinya apabila salah satu etnis merasa bahwa dirinya tidak lagi menjadi kesatuan negara ini, atau semua etnis bersama-sama meniadakan salah satu etnis tertentu, apakah negara kita tetap akan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Penjelasan di atas sama dengan teori Talcott Parsons mengenai fungsionalis struktural. Masyarakat adalah sebuah suatu kesatuan sistem. Dengan demikian, sudah seharusnya kita menganggap hilangnya keeksistensian etnis lain sebagai suatu hal yang mempengaruhi keseluruhan sistem.

Berikut adalah hal-hal yang sekiranya dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia. Pertama, kita harus mensosialisasikan panggilan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Tionghoa untuk menyebut nama etnis, dan Tiongkok untuk penyebutan nama negara China. Kedua, setelah disosialisasikan, maka kita harus sebaik mungkin menyerapnya dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi sadar apa makna dari perubahan panggilan ini. Kedepannya tidak akan ada lagi kesalahan pengucapan panggilan yang bisa menimbulkan diskriminasi sosial.

Dalam pembahasan teori linguistik pragmatik, peneliti menemukan kesimpulan bahwa sebuah percakapan menjadi berbau diskriminasi rasial, pada saat kita cenderung menggunakan panggilan “Cina” tidak pada saat yang tepat.

Tidak peduli apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, masyarakat yang beretnis non Tionghoa harus mulai memperhatikan pengucapannya apakah akan menyinggung perasaan mitra tuturnya atau tidak.

Peneliti menemukan pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dan prinsip sopan santun. Memang pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut tidak menjamin bahwa suatu percakapan memang menjadi tidak sehat, begitu pula sebaliknya, ketaatan terhadap kedua prinsip itu tetap tidak menjamin suatu percakapan menjadi lancar, tanpa salah paham. Yang perlu diingat disini adalah, apabila kita saja sudah tidak lagi memikirkan hati lawan tutur kita, dengan kata lain selalu melanggar prinsip kerjasama dan sopan santu dalam percakapan, maka kemungkinan terjadinya kesalahpahaman juga menjadi semakin besar. Kedua prinsip di atas hanya sebagai lampu kuning, untuk mengingatkan kita betapa pentingnya berbicara secara jelas dan sopan.

Selain itu juga peneliti menyarankan agar kita harus mengganti panggilan “Cina” untuk memanggil masyarakat etnis “Tionghoa”. Pertama, karena tidak terlalu sopan menyebut seseorang dengan menggunakan panggilan etnisnya, masing-masing orang mempunyai namanya masing-masing, lebih baik langsung memanggil nama saja; kedua, penyebutan etnis seringkali tidak hanya menyulut kemarahan satu pihak, namun bisa jadi sekelompok orang bahkan dalam kelompok yang lebih besar lagi; ketiga, panggilan “Cina” mempunyai sejarah panjang hingga munculnya panggilan itu, sudah selayaknya kita tidak menyamakan dengan panggilan etnis lain. Dalam artian bahwa apabila panggilan etnis lain pada saat digunakan tidak terkesan negatif karena memang dari awal tidak ada arti negatif dalam pembuatan nama etnis itu, sedangkan panggilan etnis “Cina” muncul karena memang dari awal sudah mempunyai makna negatif; keempat, kita telah mengetahui keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengganti panggilan “Cina” dengan panggilan “Tionghoa”, sebaiknya kita menghormati keputusan tersebut, sebab tujuan dari keputusan itu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Kita sendiri sudah tahu jelas maksud dan tujuan adanya keputusan itu, mengapa kita tidak memaksimalkan keputusan yang sudah ada itu.

Pada akhir pembahasan penelitian ini, peneliti berharap kedepannya akan mengurangi adanya diskriminasi rasial baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Negara yang kita tinggali ini adalah sebuah negara yang menganut Bhineka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara kita akan menjadi negara yang besar dan kuat apabila kita sebagai masyarakatnya masing-masing memahami dengan benar apa artinya kesatuan. Bhineka Tunggal Ika yang dianut oleh kita sekarang sepertinya bukanlah lagi yang maknanya sebagai: “berbeda-beda tetapi tetap satu”, namun sebaliknya adalah: “satu tetapi tetap berbeda-beda”. Semoga kita bisa tetap mengayomi makna Bhineka Tunggal Ika yang sebenarnya.